ELSHAM PAPUA
Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia
(Intitute for Human Rights Study and Advocacy)

Alamat : JL. Kampus USTJ Padang Bulan - Abepura, Jayapura, Papua | Telpon/Fax : +62 (967) 581600
Email : elsham.papua2020@gmail.com; Website : www.elshampapua.com

MEDIA RELEASE
NOMOR : 18/DIR-ELSHAM/MR/IV/2022

PRAKTEK IMPUNITAS DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASIH SANGAT KUAT.

Kemana lagi kami harus mencari keadilan di negeri ini ?, kalimat yang merupakan suatu pertanyaan dan pernyataan yang disampaikan oleh para korban dan keluarga korban pelanggaran berat HAM masa lalu di Papua. Upaya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS) HAM telah menunjukan kegigihannya dalam mendorong kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia dan secara khusus di Papua[1], hal itu terbukti dengan terangkatnya satu lagi kasus pelanggaran berat HAM Paniai yang terjadi tahun 2014 dengan susah paya ditingkat Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun nampaknya perjuangan KOMNAS HAM yang juga didorong oleh ELSHAM Papua serta pihak lain terhalang oleh supermasi politik dan kekuasaan, karena hasil yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kejaksaan Agung tidak memberikan jaminan rasa keadilan hukum terhadap para korban serta keluarga korban pencari keadilan hukum serta semua pihak yang menanti dengan sabar. Ternyata kasus inipun hasilnya mengecewakan, karena sangat mirip dengan hasil sidang Pengadilan Ad Hock kasus pelanggaran berat HAM Abepura (Abepura berdarah) yang dilakukan di Makasar tahun 2007. Dimana keputusan hakim membebaskan kedua terdakwa utama, dan memberikan pemulihan nama baik kepada kedua terdakwa utama, serta Negera memberikan promosi jabatan. Dan kepada para korban di cap sebagai separatis.

Sudah sejak awal ELSHAM Papua telah menduga bahwa pengadilan di Indonesia tidak akan mengeluarkan hasil keputusan hukum yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi hukum dan keadilan, namun kami tetap optimis dan meletekkannya dalam pandangan yang positif karena ada harapan besar bahwa kasus pelanggaran berat HAM Paniai akan menjadi pintu pembuka bagi banyaknya kasus pelanggaran berat HAM masa lalu di Indonesia. Tetapi sebaliknya keputusan yang diambil dan dikeluarkan adalah keputusan politik, dan dalam kenyataannya lagi-lagi terbukti bahwa politiklah yang mendominasi hukum dan keadilan serta kebanaran di Republik ini. Dari Hasil keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penyidikan Kasus Pelanggaran Berat HAM di Paniai, menetapkan satu tersangka pensiunan TNI. Kami menyimpulkan :

[1] https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/12/28/2049/catatan-akhir-tahun-menyoroti-penyelesaian-pelanggaran-ham-yang-berat-dan-kasus-papua.html

Pertama : Pemerintah Indonesia sama sekali tidak mempunyai niat baik untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat HAM di Indonesia dan secara khusus kasus-kasus yang terjadi di Papua.

Kedua : Sidang kasus pelanggaran berat HAM Paniai, ini dilakukan terburu-buru karena adanya tekanan Internasioanl terhadap Pemerintah Indonesia dalam kaitan dengan kondisi Papua yang sarat dengan konflik kekerasan bersenjata yang mengakibatkan banyaknya koban di pihak masyarakat sipil.

Ketiga : Pemerintah Indonesia telah mencuci tangan dan berusaha membebaskan diri dari tanggung jawabnya untuk menyeret pelaku pelanggran berat HAM di Indonesia.

Keempat : Sampai saat ini, Praktek Impunitas (*membebaskan pelaku dari proses hukum*) oleh Negera, masih sangat kuat dalam proses penyelesaian kasus-kasus pelanggran berat HAM di Indonesia dan secara khusus di Papua.

Hal tersebut terbukti dari proses yang terjadi, mulai dari kejadian kasus pelanggaran HAM saat masih menjadi dugaan pelanggaran berat HAM, sudah ada upaya menutup-nutupi dan penyangkalan dari pihak pelaku dan instutusinya[2].

Oleh sebab itu ELSHAM Papua Mendesak; "*Presiden Republik Indonesia atas nama Negara untuk bersungguh-sungguh memberi perhatian dan memenuhi janjinya agar segera menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia di Papua, secara khusus pelanggaran berat HAM Paniai Tahun 2014*".

Demikian Media Release ini dibuat demi menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan rasa keadilan hukum bagi para korban pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).

Jayapura, 13 April 2022.
ELSHAM Papua

Pdt. M. ADADIKAM, S.Th
Direktur

[2] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217185446-12-475479/komnas-ham-tni-dan-polri-halangi-pengusutan-kasus-paniai